LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

PARAF KOORDINASI

No.	Pejabat	Paraf	Tgl.
1.	Kabid Pendaker		31/7 24
2.	Kabid PSDAIC		31/07
3	Perencana		31/24 /7
4			
5.			

RENCANA KERJA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

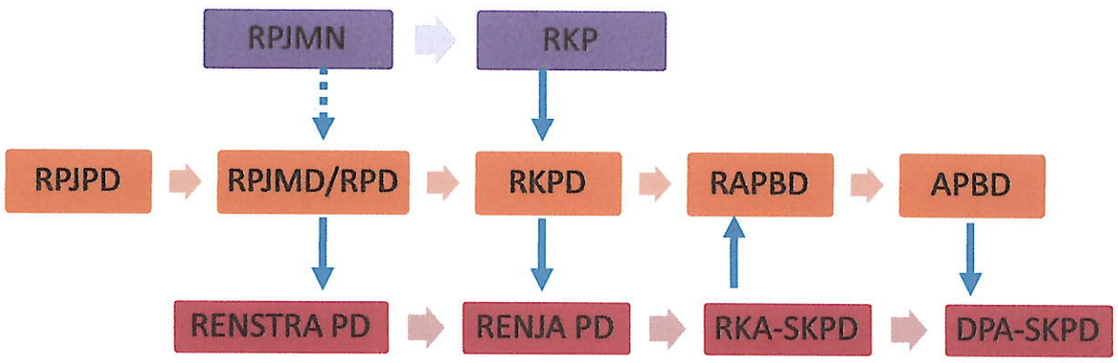
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan Perangkat Daerah untuk menyusun Renja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tahapan penyusunan Renja Perangkat Daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja Perangkat Daerah, adalah meliputi:

a. persiapan penyusunan;
b. penyusunan rancangan awal;
c. penyusunan rancangan;
d. pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
e. perumusan rancangan akhir; dan
f. penetapan.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis dalam kesinambungan perencanaan Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) atau Rencana Pembangunan Daerah (RPD), serta Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan dalam upaya pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Gambar 1.
Diagram Keterkaitan Antara Dokumen Perencanaan dan Penganggaran



Keterangan:
diperhatikan
dipedomani dan/atau diacu

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020

Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD serta didasarkan pada evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Perangkat Daerah dan pada akhirnya Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun

1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020;
16. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan.
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2025;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tantang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2012 Nomor 01 Seri D);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8).
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 Nomor 2);
31. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
32. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Kabupaten Nganjuk;
33. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 8 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk;

34. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026
35. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026;
36. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman dan acuan dalam perencanaan program, kegiatan maupun perencanaan kebutuhan anggaran atau pagu indikatif pada Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah:

a. Merumuskan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun sebagai penjabaran tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2026.
b. Menetapkan prioritas dan sasaran, rencana program dan kegiatan, indikator dan target, pagu indikatif, serta kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan tahun 2025;
c. Menjamin keterkaitan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun 2025; dan
d. Sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi, serta pertanggungjawaban kinerja Perangkat Daerah Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, disajikan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang;
1.2. Landasan Hukum;
1.3. Maksud dan Tujuan; dan
1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD; dan

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional;

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk; dan

3.3. Program dan Kegiatan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS TENAGA KERJA TAHUN LALU

Pelaksanaan evaluasi Renja Perangkat Daerah sebagai salah satu fungsi untuk mengetahui capaian kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah melalui capain kinerja program/kegiatan sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 didasarkan pada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, dan RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 beserta perubahannya, untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang kemungkinan berdampak pada target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab dimaksud.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Tenaga Kerja.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2023 dan perkiraan capaian tahun 2025 yang mengacu pada APBD Tahun Anggaran 2024, serta pencapaian RPJPD Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Pencapaian Renstra Dinas Tenaga Kerja s/d Tahun 2024

(Target Berdasarkan Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026)

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Kerja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
					Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja									
2	**07**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**80 %**	**80%**	**85%**	**85%**	**100%**	**80,5 nilai**	**75,65 nilai**	**92,98%**
2	**07**	**01**	**2.01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**14 dokumen**	**95%**	**95%**	**95%**	**100%**	**14 laporan**	**2 laporan**	**14,29%**
2	07	01	2.01	06	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 laporan	7 laporan	7 laporan	7 laporan	100%	7 laporan	2 laporan	28,57%
2	07	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkatdaeran	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daeran	7 laporan	0%	-	-	-	-	-	-
2	**07**	**01**	**2.02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen administrasi keuangan Perangkat Daerah yang disusun**	**38 dokumen**	**95%**	**95%**	**95%**	**100%**	**48 laporan**	**5 dokumen**	**10,42%**
2	07	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	18 orang	13 orang	13 orang	13 orang	100%	13 orang/bulan	39 orang	100%
2	07	01	2.02	02	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	20 laporan	20 laporan	-	-	-	4 laporan	1 laporan	25%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
						Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								
2	**07**	**01**	**2.05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang disusun**	**18 paket**	**95%**	**95%**	**95%**	**100%**	**1 dokumen**	-	-
2	07	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	18 paket	12 paket	-	-	-	15 paket	-	-
2	**07**	**01**	**2.06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah fasilitasi dan Koordinasi Bagian Umum yang Dilaksanakan**	**7 paket**	**95%**	**95%**	**95%**		**7 dokumen**	**2 dokumen**	**28,57%**
2	07	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	0	-	-	-	1 paket	1 paket	100%
2	07	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
2	07	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	100%	1 paket	1 paket	100%
2	07	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%
2	07	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
2	07	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
2	07	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 dokumen	1 dokumen	100%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
2	**07**	**01**	**2.07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang diadakan**	**192 unit**	-	-	-	-	**197 unit**	**13 unit**	**6,60%**
2	07	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	07	01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-	-	-	-	-	-	-	-
2	07	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150 unit	-	-	-	-	150 unit	-	-
2	07	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 unit	-	-	-	-	35 unit	10 unit	28,57%
2	07	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	-	-	-	-	12 unit	3 unit	25%
2	**07**	**01**	**2.08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang tersedia**		**95%**	**95%**	**95%**	**100%**	**14 laporan**	**4 laporan**	**28,57%**
2	07	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100%	1 laporan	1 laporan	100%
2	07	01	2.08	02	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100%	1 laporan	1 laporan	100%
2	07	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	3 laporan	25%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Kerja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2023)	Realisasi Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
2	**07**	**01**	**2.09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah barang milik daerah SKPD yang terawat dipelihara..**		**95%**	**95%**	**95%**	**100%**	**28 unit**	**16 unit**	**57,14%**
2	07	01	2.09	01	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	1 unit	-	-	-	1 unit	1 unit	100%
2	07	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	10 unit	10 unit	100%	10 unit	3 unit	30%
2	07	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	100%	2 unit	-	-
2	07	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	37 unit	-	-
2	07	01	2.09	09	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	-	-	-	5 unit	5 unit	100%
2	07	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	2 unit	40%
2	**07**				**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**									
2	**07**	**02**			**Program Perencanaan Tenaga Kerja**	**Prosentase akurasi, proyeksi indikator dalam rencana tenaga kerja**	**60%**	-	-	-	-	**100%**	-	-
2	**07**	**02**	**2.01**		**Penyusunan Rencana Kerja (RTK)**	**Persentase perusahaan yang menyusun RTK**	**4%**	-	-	-	-	**1 dokumen**	-	-
2	**07**	02	2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (RTK) yang disusun	1 dokumen	-	-	-	-	1 dokumen	-	-
2	**07**	**03**			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Prosentase penerapan program pelatihan berbasis**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**100%**	**10%**	**100%**

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Kerja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
						kompetensi dengan kualifikasi klaster								
2	**07**	**03**	**2.01**		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi**	**60%**	**85%**	**65%**	**66,04%**	**94,34%**	**71%**	**53,33%**	**75,11%**
2	07	03	2.01	01	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	180 orang	100%	778 orang	1.964 orang	125,25%	790 orang	160 orang	20,25%
2	07	03	2.01	02	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah kesepakatan atau koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas intruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktifitas	40 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-
2	**07**	**03**	**2.02**		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase LPK swasta yang dibina**	**80%**	-	-	-	-	**81%**	**52,08%**	**64,30%**
2	07	03	2.02	01	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	30 Lembaga	-	-	-	-	45 lembaga	30 lembaga	111,11%
2	**07**	**03**	**2.04**		**Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil**	**Persentase perusahaan kecil yang mendapatkan konsultansi peningkatan produktivitas**	**5%**	-	-	-	-	**7%**	-	-
2	07	03	2.04	01	Pelaksanaan Konsultansi Produktivitas kepada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultansi peningkatan produktivitas	10 perusahaan	-	-	-	-	15 perusahaan	-	-
2	**07**	**03**	**2.03**		**Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja**	**Persentase LPK yang memiliki perizinan**	**100%**	-	-	-	-	-	-	-
2	07	03	2.03	01	Penyediaan Sumberdaya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja secara terintegrasi	Jumlah sumberdaya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintergrasi	3 perizinan	-	-	-	-	-	-	-
2	**07**	**03**	**2.05**		**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tingkat daerah**	**1%**	-	-	-	-	-	-	-

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
2	07	03	2.05	01	Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	25 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	**07**	**04**	**2.05**		**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja**	**72%**	**94,07%**	**71%**	**72%**	**66,89%**	**92,76**	**50,5%**	**54,44%**
2	**07**	**04**	**2.01**		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan**	**85%**	**97,90%**	**84%**	**85%**	**82,04%**	**96,51%**	**44,36%**	**45,96%**
2	07	04	2.01	01	Penyediaan sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah sdm pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatiahan melalui bimtek dan lain-lain untuk peningkatan kompetensi	1500 orang	100%	80 orang	32 orang	50 orang	156,25%	-	-
2	07	04	2.01	02	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layan AKAD dan AKL	400 orang	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.01	03	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaptkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	150 Orang	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.01	04	Penyelenggaraan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasiltasi layanan ULD	20 orang	-	-	-	-	100 orang	25 orang	25%
2	07	04	2.01	05	Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah tenaga kerja yang diberdayakan melalui program perluasan kesempatan kerja	500 orang	-	-	-	-	-	-	-
2	**07**	**04**	**2.02**		**Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase LPTKS yang memiliki perizinan**	**5%**	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.02	01	Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS secara Terintegrasi	Jumlah perizinan LPTKS yang terintergrasi	15 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.02	02	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendaliansesuai dengan aturan yang berlaku	15 Lembaga	-	-	-	-	-	-	-

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
2	**07**	**04**	**2.03**		**Pengelolaan Informasi Pasar Kerja**	**Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK) online**	**70%**	**-**	**70%**	**70%**	**100%**	**80%**	**84,26%**	**105,32%**
2	07	04	2.03	01	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan informasi yang dihasilkan aplikasi informasi pasar kerja online	5 dokumen	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.03	02	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Pencaridan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui jumlah sistem online (karir hub)	1.000 orang	-	-	-	-	-	-	-
2	07	04	2.03	03	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	1.250 orang	0%	2.500 orang	721 orang	28,84%	4.000 orang	200 orang	5%
2	**07**	**04**	**2.04**		**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penemp atan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PMI (pra dan purna penempatan) yang terfasilitasi**	**70%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2	**07**	04	2.04	01	PeningkatanPerlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/ Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI /PMI yang diindungi dan ditingkatkan kompetensinya	50 Orang	-	-	-	-	-	-	-
					Penyediaan layanan terpadu pada calon pekerja migran	Jumlah CPMI yang terlayani sesuai prosedur dalam LTSA dan PMI bermasalah yang ditangani	20 orang	-	-	-	-	-	-	-
2	**07**	04	2.04	03	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Jumlah PMI purnayang diberdayakan	40 orang	-	-	-	-	-	-	-
2	**07**	**05**			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Persolisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan**	**80%**	**66,67%**	**80%**	**100%**	**125%**	**90%**	**0%**	**-**
2	**07**	**05**	**2.01**		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang**	**Persentase perusahaan yang telah mempunyai PP/PKB**	**15%**	**-**	**-**	**-**	**-**	**75%**	**-**	**-**

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
					Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota									
				01	Pengesahan peraturan perusahaan bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang melaksanakan pengesahan peraturan perusahaan yang terkait dengan HI dan terdaftar di WLKP online	35 perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
				02	Pendaftaran perjanjian kerjasama bagi perusahaan	Jumlah perusahaan yang menyusun perjanjian kerja bersama	35 perusahaan	-	-	-	-	-	-	-
2	07	05	2.01	03	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjaserta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (Pendataan sarana HI)	30 laporan	-	-	-	-	1 laporan	-	-
						Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan (Pembinaan Kepesertaan BPJS)	1 laporan	-	-	-	-	-	-	-
2	**07**	**05**	**2.02**		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Presentase Angka Sengketa per Tahun	4%	**185,33%**	**1,00%**	**100%**	**100%**	**5 perkara**	**0,45%**	**-9%**
2	07	05	2.02	01	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	30 perkara	-	1 perkara	0 Perkara	100%	-	1 perkara	100%
2	07	05	2.02	02	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, MogokKerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	Jumlah Perkara perselisihan yang terselesaikan (Penyelesaian Perselisihan HI)	20 perkara	-	-	-	-	4 perkara	1 perkara	25%

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
					Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2	07	05	2.02	03	Penyelenggaraan Verifikasi dan RekapitulasiK eanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat tBuruhserta non afiliasi	Jumlah asosiasi pengusaha dan serikat pekerja yang diverifikasi (Pembinaan Hi dan Norma Kerja)	40 asosiasi dan SP	0%	-	-	-	-	-	-
2	07	05	2.02	04	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	30 lembaga	-	1 lembaga	1 Lembaga	100%	1 lembaga	1 lembaga	100%
2	07	05	2.02	05	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Jumlah program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	80 orang	-	-	-	-	14.500 orang	50 orang	0,34%
3					**Urusan Pemerintahan Pilihan**									
3	**32**				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**									
3	**32**	**03**			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	**30%**	**28,57%**	**30%**	**9,09%**	**11,36%**	**40%**	-	-
3	**32**	**03**	**03**		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**30%**	**28,57%**	**30%**	**9,09%**	**11,36%**	**40%**	-	-
3	32	03	03	01	Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan Transmigrasi yang berasaldari 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	3 laporan	-	-	-	-	-	-	-
3	32	03	03	04	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasaldari 1 (satu) daerahKabupaten / Kota	Jumlah Transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	10 KK	100%	3 KK	1 KK	33,33%	-	-	-
3	32	03	03	05	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Jumlah calon Transmigran yang mendapatkan penyuluhan	50 orang	50%	-	-	-	-	-	-

Kode rekening					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan (sub output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran kegiatan s/d Tahun (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan/Tahun Lalu (2022)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan realisasi capaian target renstra Dinas Tenaga Kerja s/d tahun berjalan	
									Target Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2023)	Realisasi Renja Dinas Tenaga Kerja Tahun (2023)	Tingkat Realisasi (%) Tahun (2023)		Realisasi capaian program dan kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat capaian realisasi target renstra (%)
				07	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan diri di satuan pemukiman transmigrasi	4 KK	-	-	-	-	-	-	-
				09	Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan Penjajakan	4 lokasi	-	-	-	-	4 lokasi	-	-
				12	Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran	Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan pelatihan	10 KK	-	-	-	-	-	-	-
				18	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/kota sampai ke lokasi	10 KK	-	-	-	-	2 KK	-	-
				19	Bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku)	Jumlah bantuan permodalan yang diberikan kepada transmigran	10 paket	-	-	-	-	-	-	-
3	32	03	2.01	20	Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	3 lokasi	-	-	-	-	1 lokasi	-	-

Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah diukur berdasarkan capaian kinerja masing-masing indikator program dan kegiatan atas perbandingan realisasi kinerja dengan target kinerja menggunakan skala ordinal sebagai berikut:

Tabel 2.3

Kategorisasi Predikat Capaian Kinerja

No.	Interval Nilai	Predikat
1.	**≥ 91%**	Sangat Tinggi
2.	**76% ≤ 90%**	Tinggi
3.	**66% ≤ 75%**	Sedang
4.	**51% ≤ 65%**	Rendah
5.	**≤ 50%**	Sangat Rendah

Berdasarkan rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian RPJPD Perangkat Daerah s/d Tahun 2022 dapat dianalisis faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebih target kinerja, implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJPD Perangkat Daerah, serta kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.4

Analisis Faktor Penyebab, Implikasi serta Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	90,86%	Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Tidak ada faktor penyebab terhambatnya kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Terget IKM yang telah ditentukan dalam Renstra sebesar 90% dan target yang sudah	Penambahan perangkat keras personal computer untuk akses aplikasi sehingga

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
	terealisasi sampai tribulan IV sebesar 90,86%. Hal ini berarti sudah mencapai target.	meminimalisir antrian pemohon
Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	100%	Sangat Tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Prosentase Tenaga Kerja yang memiliki kompetensi dan produktivitas standard yang ditargetkan sebesar 100% dan terealisasi sebesar 100%. Ini berarti telah mencapai target.	Target yang ditentukan dalam Renstra sebesar 100% dan target yang telah terealisasi sebesar 100%. Hal ini belum mencapai target.	Memaksimalkan kegiatan pelatihan sesuai anggaran yang ada.
Program Penempatan Tenaga Kerja	66,89%	Sedang
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
- Masih kurangnya kebutuhan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan - Masih rendahnya kualitas tenaga kerja	Terdapat resiko belum tercapainya target kinerja. Jika angka persentase TPAK tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 dengan indikator Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sudah naik sekitar 0,10% dengan capaian	Memaksimalkan kegiatan magang kerja berbasis masyarakat yang ditempatan di perusahaan maupun penyiapan sumber daya pelayanan antar kerja yang dilatih untuk peningkatan kompetensi sesuai anggaran yang ada.

Program Perangkat Daerah	Capaian Kinerja	Predikat
	realisasi sebesar 66,79%	
Program Hubungan Industrial	100%	Sangat tinggi
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
Realisasi Indikator Persentase perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan diluar pengadilan tercapai 100%. Hal ini berarti tidak ada perselisihan yang diselesaikan di pengadilan.	Target yang ditentukan dalam Renstra sebesar 80% dan target yang telah terealisasi sebesar 100%. Hal ini berarti sudah mencapai target.	Memaksimalkan fungsi dan peran Mediator Hubungan Industrial dalam menyelesaikan perselisihan
Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	9,09%	Sangat Rendah
Faktor Penyebab	Implikasi Terhadap Target Renstra PD	Kebijakan Yang Diambil
1. Transmigrasi merupakan program nasional dan saling terkait antar Kementerian, Provinsi dan Kabupaten 2. Terdapat 1 KK yang diberangkatkan transmigrasi dari Kabupaten Nganjuk ke daerah lokasi transmigrasi Provinsi Bengkulu Kabupaten Bengkulu Selatan Kecamatan Kecamatan Kedurang Desa Batu Ampar.	Belum tercapainya target kinerja.	Melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi supaya mendapat kuota pemberangkatan transmigran lebih banyak.

Sumber : Laporan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 Triwulan IV

2.2. **Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

Evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Dinas Tenaga Kerja dan Pencapaian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk sampai dengan tahun 2025 (tahun berjalan) adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.5

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk

Indikator Kinerja Utama (IKU)

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi			Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Urusan Tenaga Kerja														
1.	Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka(TPT)	2,30%	2,20%	4,99%	4,80%	4,65%	3,22	4,80	4.98	4,74	4,68	-	-	-	Perubahan Renstra tahun 2018-2023
2.	Prosentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,50%	68%	68,50%	Renstra tahun 2024-2026

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No.	Indikator	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian					Proyeksi			Catatan Analisis
		Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2025	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Urusan Tenaga Kerja														
1.	Pencari kerja yang ditempatkan	1.700	1.800	1.900	2.000	2.100	3.347	1.226	3.723	2.499	2.655	2.600	2.650	2.700	Perubahan Renstra tahun 2018-2023
2.	Pelayanan Kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh	9.200	9.500	9.700	9.850	10.000	9.419	12.871	16.217	14.434	15.259	-	-	-	Perubahan Renstra tahun 2018-2023
3.	Jumlah transmigran yang diberangkatkan	3 KK	5 KK	7 KK	10 KK	12 KK	6KK	0	0	1 KK	1 KK	1 KK	1 KK	1 KK	Perubahan Renstra tahun 2018-2023
4	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang selesai dengan perjanjian bersama	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3	4	5	Renstra tahun 2024-2026

Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan bidang yang kompleks karena berkaitan langsung dengan tenaga kerja dan transmigrasi yang notabenenya adalah manusia mandiri yang memiliki dua fungsi yaitu sebagai individu dan makhluk sosial. Ketidak seimbangan lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah pencari kerja akan menimbulkan permasalahan lain yang sifatnya dapat meluas dan keluar dari kewenangan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk. Oleh karena itu, koordinasi dan kerjasama dengan instansi lain perlu mendapatkan perhatian.

Secara umum Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan fungsi pelaksanaan tugas teknis operasional dan penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi ketatalaksanaan yang baik dan profesional sehingga dapat menciptakan kesatuan gerak dan langkah dalam satu rantai kerja kedinasan guna memberikan pelayanan di bidang ketenagakerjaan di daerah. Indikator umum untuk keberhasilan pelaksanaan fungsi ini adanya tingkat kepuasan pada dasarnya sehingga jumlah lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran. Persentase TPT pada tahun 2023 baru dipublikasikan pada tribulan IV pada tanggal 17 November 2023. Persentase TPT tahun 2023 sebesar 4,68% dengan capaian kinerja sebesar 99,32% dari target tahunan yang telah ditentukan sebesar 4,65% berarti telah mencapai target. Persentase TPT 4,68% ini diperoleh dari perbandingan jumlah penduduk yang mengangur sebanyak 27.910 orang terhadap jumlah angkatan kerja sejumlah 596.110 orang. Jika dibandingkan dengan target TPT tahun 2022 sebesar 4,74% hal ini mengalami penurunan pengangguran sebesar 0.06%.

Dalam hal ini indikator tersebut mengalami penurunan pengangguran sebesar 0,06% atau sebanyak 1.060 orang. Indikator tersebut dikatakan mencapai target dan dipengaruhi oleh adanya jumlah penduduk yang menganggur telah mengikuti pelatihan, magang kerja di sejumlah perusahaan di Kabupaten Nganjuk maupun *job fair* yang diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan di sektor ketenagakerjaan meliputi penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan. Agar pelayanan,

pembinaan, dan pengembangan sektor ketenagakerjaan, menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek-aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu-isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Permasalahan yang kerap dihadapi pada Dinas Tenaga Kerja adalah :

1. Belum sesuainya kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja
2. Masih tingginya tingkat turn over di perusahaan karena rendahnya etos kerja
3. Masih adanya perusahaan yang belum menerapkan norma dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor tenaga kerja, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dapat merumuskan isu strategis dari permasalahan tersebut, yakni sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi pencari kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja
2. Peningkatan etos kerja melalui pembentukan karakter tenaga kerja yang produktif
3. Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di perusahaan

2.4. Tingkat Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah dan Hal Kritis Yang Terkait Dengan Pelayanan Perangkat Daerah

Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2022 dilaksanakan secara elektronik berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sehingga pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 89.80% dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik), juga menggunakan indikator penilaian kepuasan masyarakat yang mendasarkan 9 unsur yang diwajibkan dalam peraturan tersebut yang meliputi:

1. Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruhproses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara. Segala jenis pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk tidak dipungut biaya atau GRATIS.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak (gedung).
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun di Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1.	Persyaratan	100%
2.	Prosedur	100%
3.	Waktu Pelayanan	100%
4.	Biaya/Tarif	100%
5.	Produk Spesifikasi Jenis	100%
6.	Layanan	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
7.	Kompetensi Pelaksana	100%
8.	Sarana Prasarana	100%
9.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	100%

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

2.5. Permasalahan dan Hambatan Yang Dihadapi Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, terdapat beberapa faktor pendorong maupun faktor penghambat dalam hal peningkatan pelayanan baik dari kondisi internal dan eksternal, antara lain:

Kondisi Internal

a. Faktor Pendorong

1) Kabupaten Nganjuk memiliki potensi sebagai daerah kawasan industri alternatif di Jawa Timur, karena masih banyak lahan yang bisa dimanfaatkan serta angkatan kerja yang cukup banyak;

2) Kondisi hubungan industrial yang relatif kondusif;

b. Faktor Penghambat

1) Belum diterapkannya penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) dengan tegas dan jelas sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN)

2) Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi

3) Belum optimalnya personil dalam menjalankan tugas sesuai dengan fungsinya

4) Belum optimalnya penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi

Kondisi Eksternal

a. Faktor Pendorong

1) Jumlah Infrastruktur perhubungan yang memadai khususnya dampak pembangunan jalan tol trans jawa.

2) Investor luar daerah mulai mengalihkan investasinya terutama industri padat karya ke daerah yang relatif kondusif hubungan industrialnya, pun juga Upah Minimum Kabupaten Nganjuk dipandang masih rasional

3) Tingginya minat masyarakat dalam mengikuti fasilitasi maupun pelatihan

4) Teknologi informasi yang semakin maju

b. Faktor Penghambat

1) Masih tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran

2) Persaingan produk sejenis dari luar daerah

3) Kurangnya sinergisitas kebijakan/regulasi dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah

4) Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja

5) Banyak tenaga kerja belum bersertifikasi kompetensi (belum lulus uji kompetensi)

6) Rendahnya motivasi untuk bersaing di pasar kerja lokal, nasional maupun global

7) Masih rendahnya kesejahteraan pekerja

8) Minat masyarakat yang terbatas pada jenis jenis pekerjaan tertentu

2.6 Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk serta Program Nasional/Internasional Yang Mencakup Standar Pelayanan Minimal dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Adapun Visi dan Misi Bupati Nganjuk dan Wakil Bupati Nganjuk telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) tahun 2024 – 2026 sebagai berikut :

Tujuan RPD : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup			
Sasaran RPD: Meningkatkan kesempatan kerja			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Peningkatan persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja
			Meningkatkan pembinaan terhadap kualitas Lembaga Pelatihan Kerja
			Meningkatkan penempatan angkatan kerja melalui mekanisme Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Lokal (AKL), dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
			Mengoptimalkan penempatan calon transmigran
	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Peningkatan persentase kasus perselisihan HI yang diselesaikan diluar pengadilan	Optimalisasi penyelesaian perselisihan hubungan industrial
			Pembinaan norma dan syarat kerja secara berkelanjutan
			Optimalisasi tingkat kepatuhan perusahaan dalam melaksanakan

Tujuan RPD : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan penanggulangan kemiskinan melalui pemerataan pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup			
Sasaran RPD: Meningkatkan kesempatan kerja			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			ketentuan hukum peraturan ketenagakerjaan
			Memberdayakan lembaga kerjasama Bipartit di tiap-tiap perusahaan sebagai salah satu sarana hubungan industrial dalam rangka menjalin komunikasi dan konsultasi antara pengusaha dan pekerja

Dengan dicanangkannya program Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah melaksanakan program pencapaian 17 Tujuan TPB dan mengintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah. Secara keseluruhan 17 Tujuan TPB tersebut adalah sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun.
2. Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, meningkatkan gizi, dan mendorong pertanian yangberkelanjutan.
3. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan bagi seluruh orang di segala usia.
4. Menjamin pendidikan yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi setiap orang.
5. Menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh perempuan.
6. Menjamin ketersediaan dan pengelolaan air serta sanitasi yang berkelanjutan bagi seluruh orang.
7. Menjamin akses energi yang terjangkau, terjamin, berkelanjutan serta modern bagi semua orang.

8. Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang.
9. Membangun infrastruktur yang berketahanan, mendorong industrialisasi yang inklusif dan berkelanjutan serta membina inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan di dalam dan di antaranegara.
11. Menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, berketahanan, aman dan berkelanjutan.
12. Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
13. Mengambil tindakan segera untuk memerangi perubahan iklim serta dampaknya.
14. Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan dan sumber daya lautsecara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.
15. Melindungi, memperbarui, dan mendorong pemakaian ekosistem daratan yang berkelanjutan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, menghentikan dan memulihkan degradasi tanah, serta menghentikan kerugian keanekaragaman hayati.
16. Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan.
17. Memperkuat perangkat-perangkat implementasi *(means of implementation)* dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Berkenaan dengan tugas dan fungsi (Perangkat Daerah) memberikan kontibusi terhadap **Tujuan ke 8 yaitu *Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang*** dengan sasaran menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi. Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya.

Tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk meliputi:

1. Faktor Internal
   a. Peluang
      1) Kabupaten Nganjuk memiliki potensi sebagai daerah kawasan industrial ternatif di Jawa Timur, karena masih banyak lahan yang bias dimanfaatkan serta angkatan kerja yang cukup banyak;
      2) Kondisi hubungan industrial yang relative kondusif; dan

   b. Tantangan
      1) Belum diterapkannya penghargaan (*reward*) dan hukuman (*punishment*) dengan tegas dan jelas sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat memotivasi Aparatur Sipil Negara (ASN);
      2) Kurang terpadunya pengelolaan data dan informasi;
      3) Belum optimalnya penggunaan serta pemanfaatan teknologi informasi.

2. Faktor Eksternal
   a. Peluang
      1) JumlahInfrastruktur perhubungan yang memadai khususnya dampak pembangunan jalan tol trans jawa;
      2) Investor luar daerah mulai mengalihkan investasinya terutama industry padat karya kedaerah yang relative kondusif hubungan industrialnya, pun juga Upah Minimum Kabupaten Nganjuk dipandang masih rasional;
      3) Tingginya minat masyarakat dalam mengikuti fasilitasi maupun pelatihan;
      4) Teknologi informasi yang semakin maju.

   b. Tantangan
      1) Masih tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran;
      2) Persaingan produk sejenis dari luar daerah;
      3) Kurangnya sinergisitas kebijakan/regulasi dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
      4) Masih rendahnya kualitas dan produktifitas tenaga kerja
      5) Banyak tenaga kerja belum bersertifikasi kompetensi

(belum lulus uji kompetensi);

6) Rendahnya motivasi untuk bersaing di pasar kerjalokal, nasional maupun global;

7) Masih rendahnya kesejahteraan pekerja;

8) Minat masyarakat yang terbatas pada jenis jenis pekerjaan tertentu;

2.6. Isu-isu Penting dan Strategis Untuk Ditindak lanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja, maka keluaran (*output*) kegiatan yang dihasilkan adalah pelayanan di sektor ketenagakerjaan meliputi penempatan tenaga kerja, peningkatan kualitas dan produktifitas tenaga kerja serta perlindungan dan pengembangan lembaga ketenagakerjaan.

Agar pelayanan, pembinaan, dan pengembangan sektor ketenagakerjaan menjadi lebih efektif dan efisien, diperlukan pemahaman terhadap kondisi yang ada maupun aspek- aspek yang dapat mempengaruhi keberhasilan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, perlu adanya identifikasi permasalahan maupun perumusan isu- isu strategis dalam penyusunan perencanaan. Hal ini dilakukan untuk memanfaatkan peluang dan kekuatan yang ada, serta sebagai antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya kesulitan maupun kegagalan yang bisa mengakibatkan kerugian yang lebih besar.

Permasalahan yang kerap dihadapi pada Dinas Tenaga Kerja adalah :

1. Belum sesuainya kompetensi pencari kerja dengan kebutuhan pasar kerja;
2. Masih tingginya tingkat turn over di perusahaan karena rendahnya etos kerja;
3. Masih adanya perusahaan yang belum menerapkan norma dan syarat kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Merujuk pada identifikasi permasalahan di sektor tenaga kerja, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk dapat merumuskan isu strategis, yakni sebagai berikut :

1. Peningkatan kompetensi pencari kerja melalui pelatihan berbasis kebutuhan pasar kerja;

2. Peningkatan etos kerja melalui pembentukan karakter tenaga kerja yang produktif;

3. Pemberdayaan Lembaga Kerja Sama Bipartit di Perusahaan.

2.7. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rumusan tematik pembangunan pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 adalah **"Meningkatkan Kemandirian Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Penguatan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas, Potensi Unggulan Daerah, Pembangunan Infrastruktur dan Reformasi Birokrasi".**

Proses review rancangan awal RKPD Tahun 2025 adalah membandingkan antara rancangan awal RKPD Tahun 2025 dengan analisis kebutuhan. Temuan proses reviu tersebut berupa identifikasi rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan yang sesuai namun besarannya berbeda, sebagaimana disajikan tabel berikut:

Tabel 2.6

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Disnaker	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	81	**4.697.796.950**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	Disnaker	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	81	**4.697.796.950**	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disnaker	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**16 dokumen**	**15.680.000**	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	Disnaker	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	**16 dokumen**	**15.680.000**	
	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	15.680.000	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	16 laporan	15.680.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Disnaker	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21 laporan**	**3.791.378.000**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	Disnaker	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**21 laporan**	**3.791.378.000**	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang	3.787.233.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Disnaker	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	19 orang	3.787.233.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semesteran SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4.145.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	4 Laporan	4.145.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Disnaker	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 dokumen**	**3.330.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Disnaker	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 dokumen**	**3.330.000**	
	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Disnaker	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	19 paket	3.330.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Disnaker	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	19 paket	3.330.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Disnaker	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**60 dokumen**	**188.942.000**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	Disnaker	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**60 dokumen**	**188.942.000**	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	27.500.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	27.500.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Bahan Logistik	4 paket	31.369.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Disnaker	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 paket	31.369.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Kantor yang Disediakan								
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disnaker	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	11.848.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Disnaker	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	11.848.000	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	6.000.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Disnaker	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	6.000.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disnaker	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	4.725.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Disnaker	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	4.725.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	135.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Disnaker	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	135.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah	Disnaker	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	197 unit	**465.000.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan pemerintah Daerah**	Disnaker	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disediakan**	197 unit	**465.000.000**	
	Pengadaan Mebel	Disnaker	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150 unit	140.000.000	Pengadaan Mebel	Disnaker	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	150 unit	140.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Unit Peralatan dan	35 unit	175.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	35 unit	175.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			Mesin Lainnya yang Disediakan								
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disnaker	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	150.000.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Disnaker	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	12 unit	150.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Disnaker	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14 laporan**	**470.820.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Disnaker	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**14 laporan**	**470.820.000**	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 dokumen	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 dokumen	2.500.000	
	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	81.500.000	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	81.500.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	386.820.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Disnaker	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	386.820.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Disnaker	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**24 unit**	**227.646.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	Disnaker	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**24 unit**	**227.646.000**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pemerintah Daerah										
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	55.146.000	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	55.146.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	225.924.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Disnaker	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	225.924.000	
	Pemeliharaan Mebel	Disnaker	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	25.000.000	Pemeliharaan Mebel	Disnaker	Jumlah Mebel yang Dipelihara	2 unit	25.000.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	15.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Disnaker	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 unit	15.000.000	
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disnaker	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	150.000.000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Disnaker	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 unit	150.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Disnaker	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau	5 unit	7.500.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana	Disnaker	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan	5 unit	7.500.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
	Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja	Disnaker				**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**	Disnaker				
	Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Disnaker	**Prosentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster**	**100%**	**875.000.000**	**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	Disnaker	**Prosentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster**	**100%**	**875.000.000**	
	Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	Disnaker	**Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi**	**71%**	**815.000.000**	**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	Disnaker	**Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi**	**71%**	**815.000.000**	
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Disnaker	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	220 orang	665.000.000	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Disnaker	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	220 orang	665.000.000	
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker	**Persentase LPK swasta yang dibina**	**80%**	**10.000.000**	**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	Disnaker	**Persentase LPK swasta yang dibina**	**80%**	**10.000.000**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	27 lembaga	10.000.000	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Disnaker	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	27 lembaga	10.000.000	
	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	**Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tingkat daerah**	**1%**	**50.000.000**	**Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	**Persentase pertumbuhan produktivitas tenaga kerja tingkat daerah**	**1%**	**50.000.000**	
	Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	Disnaker	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	5 dokumen	50.000.000	Pengukuran Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja	Disnaker	Jumlah dokumen hasil pengukuran produktivitas dan daya saing tenaga kerja di tingkat daerah	5 dokumen	50.000.000	
	Program Penempatan Tenaga Kerja	Disnaker	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**	**83%**	**1.000.000.000**	**Program Penempatan Tenaga Kerja**	Disnaker	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**	**83%**	**1.000.000.000**	
	Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	**Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan fasilitasi**	**86%**	**925.000.000**	**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	**Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan**	**86%**	**925.000.000**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			pelayanan antar kerja					**fasilitasi pelayanan antar kerja**			
	Pelayanan Antar Kerja	Disnaker	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layan AKAD dan AKL	200 orang	600.000.000	Pelayanan Antar Kerja	Disnaker	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layan AKAD dan AKL	200 orang	600.000.000	
	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja	Disnaker	Jumlah pencari kerja yang mendaptkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	50 orang	100.000.000	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi pencari kerja	Disnaker	Jumlah pencari kerja yang mendaptkan penyuluhan dan bimbingan jabatan	50 orang	100.000.000	
	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker	Jumlah Pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui jumlah sistem online (karir hub)	300 orang	25.000.000	Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online	Disnaker	Jumlah Pencari dan pemberi kerja yang terdaftar dalam pasar kerja melalui jumlah sistem online (karir hub)	300 orang	25.000.000	
	Job Fair/Bursa Kerja	Disnaker	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan	1.500 orang	200.000.000	Job Fair/Bursa Kerja	Disnaker	Jumlah pencari kerja yang mendaatkan pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja	1.500 orang	200.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			pekerjaan melalui job fair/ bursa kerja								
	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penemp atan) di Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	**Persentase PMI (pra dan purna penempatan) yang terfasilitasi**	**4%**	**75.000.000**	**Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penemp atan) di Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	**Persentase PMI (pra dan purna penempatan) yang terfasilitasi**	**4%**	**75.000.000**	
	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Disnaker	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	20 orang	75.000.000	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Disnaker	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	20 orang	75.000.000	
	Program Hubungan Industrial	Disnaker	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan**	**90%**	**800.000.000**	**Program Hubungan Industrial**	Disnaker	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan**	**90%**	**800.000.000**	
	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanajian Kerja	Disnaker	**Jumlah perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial**	**107 perusahaan**	**50.000.000**	**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanajian Kerja**	Disnaker	**Jumlah perusahaan yang telah menyelenggarakan**	**107 perusahaan**	**50.000.000**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Bersama untu yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota		**tenaga kerja diatas 50%**			**Bersama untu yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**		**jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%**			
	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial teaga Kerja Pengupahan	Disnaker	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	1 laporan	50.000.000	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial teaga Kerja Pengupahan	Disnaker	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	1 laporan	50.000.000	
	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1	Disnaker	**Presentase Angka Sengketa per Tahun**	**1%**	**750.000.000**	**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1**	Disnaker	**Presentase Angka Sengketa per Tahun**	**1%**	**750.000.000**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	(Satu) Daerah Kabupaten/Kota					**(Satu) Daerah Kabupaten/Kota**					
	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah perselisihan yang dicegah	5 perkara	300.000.000	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah perselisihan yang dicegah	5 perkara	300.000.000	
	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada	Disnaker	Jumlah Perkara perselisihan yang terselesaikan (Penyelesaian Perselisihan HI)	5 perkara	100.000.000	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan	Disnaker	Jumlah Perkara perselisihan yang terselesaikan (Penyelesaian Perselisihan HI)	5 perkara	100.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					
	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	150.000.000	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	150.000.000	
	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Disnaker	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	90 orang	150.000.000	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Disnaker	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	90 orang	150.000.000	
	Urusan Pemerintahan Pilihan	Disnaker				**Urusan Pemerintahan Pilihan**	Disnaker				
	Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi	Disnaker			**225.000.000**	**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**	Disnaker			**225.000.000**	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Disnaker	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	**100%**	**225.000.000**	**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	Disnaker	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	**100%**	**225.000.000**	
	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Disnaker	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**20%**	**225.000.000**	**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	Disnaker	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**20%**	**225.000.000**	
	Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan Transmigrasi yang berasaldari 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	Disnaker	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 laporan	50.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan Transmigrasi yang berasaldari 1 (satu) daerah Kabupaten / Kota	Disnaker	Jumlah laporan hasil koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota	1 laporan	50.000.000	
	Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran	Disnaker	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak	1 dokumen	50.000.000	Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran	Disnaker	Jumlah pelaporan kelayakan lingkungan dan permukiman transmigrasi (yang memenuhi kriteria layak huni, layak usaha dan layak berkembang)	1 dokumen	50.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
			usaha dan layak berkembang)								
	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasaldari 1 (satu) daerahKabupaten / Kota	Disnaker	Jumlah Transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	3 KK	75.000.000	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang berasaldari 1 (satu) daerahKabupaten / Kota	Disnaker	Jumlah Transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	3 KK	75.000.000	
	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Disnaker	Jumlah calon Transmigran yang mendapatkan penyuluhan	50 orang	50.000.000	Penyuluhan Transmigrasi Lokal	Disnaker	Jumlah calon Transmigran yang mendapatkan penyuluhan	50 orang	50.000.000	
	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Disnaker	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan diri di di satuan pemukiman transmigrasi	6 KK	45.000.000	Penyesuaian Lingkungan Baru Transmigran di Kawasan Transmigrasi	Disnaker	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Mampu Menyesuaikan diri di satuan pemukiman transmigrasi	6 KK	45.000.000	
	Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Disnaker	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan Penjajakan	6 lokasi	75.000.000	Penjajakan ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Disnaker	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang dilaksanakan Penjajakan	6 lokasi	75.000.000	
	Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran	Disnaker	Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan pelatihan	15 KK	56.000.000	Fasilitasi Pelatihan Calon Transmigran	Disnaker	Jumlah Calon Transmigran yang mendapatkan pelatihan	15 KK	56.000.000	

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/ Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Disnaker	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/kota sampai ke lokasi	15 KK	125.000.000	Pendampingan dari Kabupaten/Kota sampai ke Lokasi	Disnaker	Jumlah Transmigran yang diberikan pendampingan dari penampungan Kabupaten/kota sampai ke lokasi	15 KK	125.000.000	
	Bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku)	Disnaker	Jumlah bantuan permodalan yang diberikan kepada transmigran	15 paket	100.000.000	Bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku)	Disnaker	Jumlah bantuan permodalan yang diberikan kepada transmigran	15 paket	100.000.000	
	Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi	Disnaker	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	6 lokasi	100.000.000	Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi	Disnaker	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	6 lokasi	100.000.000	

Sumber : Hasil Analisis Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

2.8. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bagian ini menguraikan hasil kajian terhadap program dan kegiatan yang diusulkan oleh para pemangku kepentingan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk. Sesuai dengan Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yaitu menggunakan pendekatan atas-bawah (*top-down*) yaitu perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah (*top-down*) diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa.

Disinilah semua data dari para pemangku kepentingan berawal dan berakhir. Usulan dari semua pemangku kepentingan disusun sebagai bahan untuk didiskusikan, ditelaah secara kritis oleh semua pemangku kepentingan pengusul, dan konfirmasi kembali sebelum diproses menjadi Rencana Kerja (RENJA). Telaahan usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan selajutnya disajikan dalam tabel di bawah ini

Tabel 2.7
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Kabupaten Nganjuk Tahun 2025

NO	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

NIHIL

Sumber : Hasil Kajian Perangkat Daerah Tahun 2023

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang mengambil tema **"Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif Dan Berkelanjutan."** Dasar prioritas nasional mencapai target sasaran Pembangunan tahun 2025 pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 dengan 8 (delapan) Prioritas Nasional yaitu :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
2. Memantapkan sistem pertahana keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru
3. Melanjutkan Pembangunan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industry kreatif serta mengembangkan agomaritim industry di sentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z) dan penyandang disabilitas
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industry berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai Masyarakat yang adil dan Makmur.

Dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 menuntut upaya konkrit, dengan menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan daerah yang secara langsung memiliki relevansi

terhadap tema pembangunan nasional dan mendukung pencapaian sasaran, arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Perangkat Daerah Tahun 2024-2026 adalah "*Meningkatnya penyerapan angkatan kerja*", adapun sasaran yang akan dicapai adalah "*Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja*" dan "*Meningkatnya Hubungan Industrial yang Harmonis*", dengan target kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**
Meningkatnya penyerapan angkatan kerja	Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	68%
Sasaran Perangkat Daerah	**Indikator Kinerja**	**Target Tahun 2025**
Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	84%
Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	90%

Sumber : Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026

3.3 Program dan Kegiatan

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dalam perumusan program dan kegiatan Perangkat Daerah tahun 2025 mempedomani agenda pembangunan nasional dan daerah serta mempertimbangkan kondisi global saat ini.

3.1.1 Pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Nganjuk

Perumusan tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 berdasarkan visi, misi dan arah kebijakan pembangunan tahap ke IV RPJPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025, kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 3 tahun. Tujuan dan sasaran dalam RPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026 yaitu

1. Nganjuk Tumbuh;
2. Nganjuk Sehat dan Cerdas;
3. Nganjuk Akuntabel;
4. Nganjuk Harmonis.

Keterkaitan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk terletak pada Rumusan tujuan yang ke 1 yaitu **"Nganjuk Tumbuh"** dengan sasaran ke-5 yaitu **Meninngkatkan penyerapan tenaga kerja** dengan indikator sasaran **Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**.

1.3.2. Pencapaian Target Pelayanan Dasar

Survei Kepuasan Masyarakat pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk pada Tahun 2023 dilaksanakan secara elektronik dengan aplikasi e-SUKMA berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, sehingga pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat sebesar 89.80% dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik), juga

menggunakan indikator penilaian kepuasan masyarakat yang mendasarkan 9 unsur yang diwajibkan dalam peraturan tersebut yang meliputi:

1. Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun non teknis.
2. Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu penyelesaian yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruhproses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara. Segala jenis pelayanan pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk tidak dipungut biaya atau GRATIS.
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. Sarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang bergerak (mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak bergerak.
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan yaitu tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Untuk semua jenis penerima layanan setiap tahun di Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.2

Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
1.	Persyaratan	100%
2.	Prosedur	100%
3.	Waktu Pelayanan	100%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Target
4.	Biaya/Tarif	100%
5.	Produk Spesifikasi Jenis	100%
6.	Layanan	100%
7.	Kompetensi Pelaksana	100%
8.	Sarana Prasarana	100%
9.	Penanganan Pengaduan,Saran,dan Masukan	100%

Sumber : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017

3.3.3. Pencapaian Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Upaya pencapaian target TPB/*SDG's* menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/*SDG's* di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Tabel 2.6
Target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)
Kabupaten Nganjuk

Target 8.3 Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline Tahun 2021 (7)	Target SDGs Tahun 2022 (8)	Realisasi SDGs Tahun 2022 (9)	Status (10)
8.3.1.(a)**	Persentase tingkat kesempatan kerja	Dinas Tenaga Kerja: Laporan Kinerja Tahunan	%	95,02		95,26	
Target 8.5 Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline Tahun 2021 (7)	Target SDGs Tahun 2022 (8)	Realisasi SDGs Tahun 2022 (9)	Status (10)

8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur	BPS, Nganjuk Dalam Angka	%	4,98	4,8	4,74	Tercapai
Target 8.6 Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi usia muda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline Tahun 2021 (7)	Target SDGs Tahun 2022 (8)	Realisasi SDGs Tahun 2022 (9)	Status (10)
8.6.1**	Persentase penganggur dan setengah penganggur yang ditempatkan	Dinas Tenaga Kerja: Laporan Kinerja Tahunan	%	81,06	84	82,24	Belum Tercapai
Target 8.8: Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, ermasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang bekerja dalam pekerjaan berbahaya							
Kode Indikator (3)	Nama Indikator (4)	Sumber Data (5)	Satuan (6)	Baseline Tahun 2021 (7)	Target SDGs Tahun 2022 (8)	Realisasi SDGs Tahun 2022 (9)	Status (10)
8.8.1.(a)**	Persentase kasus perselisihan hubungan indsutrial yang diselesaikan diluar pengaadilan	Dinas Tenaga Kerja: Laporan Kinerja Tahunan	%	80	85	70,59	Belum Tercapai

Dari berbagai faktor pertimbangan yang telah diuraikan sebelumnya dapat dirumuskan rekapitulasi program dan kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana tabel berikut :

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tahun 2025 dan pencapaian target tujuan dan sasaran Perangkat Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2026, serta sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dirumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2025. Selain itu, juga untuk mendukung pelayanan Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan dalam Bidang Tenaga Kerja.

Tabel 4.1

Prioritas Pembangunan Daerah

No.	Prioritas Daerah	Alokasi (2025)
1.	Mengentaskan Kemiskinan Dan Meningkatkan Kesejahteraan Sosial	Rp.2.754.814.000,00

Tabel 4.2

Sasaran Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (2025)	Alokasi (2025)
1.	Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	84%	Rp.2.234.357.750,00
2.	Meningkatnya hubungan industrial yang harmonis	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan	90%	Rp.520.456.250,00

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Pemerintahan Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2025

REKAPITULASI RKA-BELANJA SKPD

Organisasi : Dinas Tenaga Kerja

Rincian Anggaran Belanja
Berdasarkan Program dan Kegiatan

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
Dinas Tenaga Kerja														
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	07				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA									
2	07	03			PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA									
2	07	03	2.01		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi									
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 420.675.950				Rp. 420.675.950	Rp. 1.372.400.000
2	07	03	2.02		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta									
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 79.850.000				Rp. 79.850.000	Rp. 95.000.000
2	07	03	2.04		Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil									
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 29.947.000				Rp. 29.947.000	Rp. 30.000.000
2	07	04			PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA									
2	07	04	2.01		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota									

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 99.975.000				Rp. 99.975.000	Rp. 300.000.000
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 442.124.000				Rp. 442.124.000	Rp. 100.000.000
2	07	04	2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 133.468.800				Rp. 133.468.800	Rp. 50.000.000
2	07	04	2.03		Pengelolaan Informasi Pasar Kerja									
2	07	04	2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 181.125.000				Rp. 181.125.000	Rp. 245.000.000
2	07	04	2.04		Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota									
2	07	04	2.04	0003	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 94.408.000				Rp. 94.408.000	Rp. 105.000.000
2	07	05			PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL									
2	07	05	2.01		Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 21.106.200				Rp. 21.106.200	Rp. 110.000.000
2	07	05	2.02		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota									
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 287.007.000				Rp. 287.007.000	Rp. 115.000.000
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.723.000				Rp. 30.723.000	Rp. 115.000.000
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 48.679.000				Rp. 48.679.000	Rp. 275.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 25.241.000				Rp. 25.241.000	Rp. 175.000.000
2	07	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
2	07	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah									
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 15.450.000				Rp. 15.450.000	Rp. 15.680.000
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.508.000				Rp. 7.508.000	Rp. 6.000.000
2	07	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah									
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.722.878.501				Rp. 2.722.878.501	Rp. 3.647.333.000
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.128.000				Rp. 4.128.000	Rp. 4.152.000
2	07	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah									
2	07	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 60.800.000				Rp. 60.800.000	Rp. 70.000.000
2	07	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah									
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 753.000				Rp. 753.000	Rp. 27.500.000
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 79.810.128				Rp. 79.810.128	Rp. 65.600.000
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 12.513.650				Rp. 12.513.650	Rp. 25.300.000
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.000.000				Rp. 3.000.000	Rp. 6.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.500.000				Rp. 7.500.000	Rp. 20.125.000
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 447.324.000				Rp. 447.324.000	Rp. 255.000.000
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 4.100.000	Rp. 9.900.000			Rp. 14.000.000	Rp. 30.000.000
2	07	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 38.382.300			Rp. 38.382.300	Rp. 40.000.000
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Rp. 444.878.850			Rp. 444.878.850	Rp. 96.000.000
2	07	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.906.650	Rp. 2.399.000			Rp. 13.305.650	Rp. 45.000.000
2	07	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.390.000				Rp. 2.390.000	Rp. 10.000.000
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 30.000.000				Rp. 30.000.000	Rp. 98.000.000
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 448.740.000				Rp. 448.740.000	Rp. 444.780.000
2	07	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 48.650.000				Rp. 48.650.000	Rp. 76.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 90.865.100				Rp. 90.865.100	Rp. 226.067.000
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan Mebel	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 3.000.000				Rp. 3.000.000	Rp. 25.000.000
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 10.150.000				Rp. 10.150.000	Rp. 80.000.000
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 209.700.000				Rp. 209.700.000	Rp. 55.000.000
2	07	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 7.000.000				Rp. 7.000.000	Rp. 1.125.000.000
3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN									
3	32				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI									
3	32	03			PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI									
3	32	03	2.01		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota									
3	32	03	2.01	0004	Pemindahan dan Penempatan Transmigran yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 8.000.000				Rp. 8.000.000	Rp. 42.000.000
3	32	03	2.01	0009	Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 2.000.000				Rp. 2.000.000	Rp. 75.000.000
3	32	03	2.01	0019	Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 20.000.000				Rp. 20.000.000	Rp. 100.000.000

Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	Jumlah						
								Tahun - 1	Tahun N					Tahun + 1
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah (Rp)	
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kab. Nganjuk, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		Rp. 1.500.000				Rp. 1.500.000	Rp. 100.000.000
Jumlah									**Rp. 6.152.996.979**	**Rp. 495.560.150**			**Rp. 6.648.557.129**	**Rp. 9.897.937.000**

Kab. Nganjuk.....
Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja

SAMSUL HUDA, S.H, M.H
NIP. 196608101992031011

Tabel 4.3

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2025

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
2	07				**Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja**			
2	07	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**	**Nilai SAKIP Perangkat Daerah**	81,00	**4.773.035.029**
2	07	01	2.01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun**	26 dokumen	**22.958.000**
2	07	01	2.01	0006	Koordinasi dan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	20 laporan	15.450.000
2	07	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	6 laporan	7.508.000
2	07	01	2.02		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**4 dokumen**	**2.727.006.501**
2	07	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14 orang/bulan	2.722.878.501
2	07	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan	4.128.000

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
2	07	01	2.05		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**1 dokumen**	**60.800.000**
2	07	01	2.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah unit peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	2 unit	60.800.000
2	07	01	2.06		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**32 dokumen**	**637.695.228**
2	07	01	2.06	0001	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	753.000
2	07	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 paket	67.403.078
2	07	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	17.530.150
2	07	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 dokumen	3.000.000
2	07	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 laporan	7.500.000
2	07	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	507.509.000
2	07	01	2.06	0010	Penatausahaan arsip dinamis pada SKPD	Jumlah dokumen penataan arsip dinamis pada SKPD	1 dokumen	14.000.000
2	07	01	2.07		**Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah**	**Jumlah barang milik daerah yang disediakan**	36 unit	**465.100.300**

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
2	07	01	2.07	0005	Pengadaan mebel	Jumlah paket mebel yang disediakan	36 unit	70.829.300
2	07	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	28 unit	380.965.350
2	07	01	2.07	0010	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor/bangunan lainnya yang disediakan	98 unit	13.305.650
2	07	01	2.08		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**36 laporan**	**481.340.000**
2	07	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 laporan	2.600.000
2	07	01	2.08	0002	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	30.000.000
2	07	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	448.740.000
2	07	01	2.09		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang terpelihara**	**63 unit**	**378.135.000**
2	07	01	2.09	0001	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	48.650.000

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
2	07	01	2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 unit	94.735.000
2	07	01	2.09	0005	Pemeliharaan mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	20 unit	30.000.000
2	07	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 unit	10.150.000
2	07	01	2.09	0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	209.700.000
2	07	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	17 unit	11.900.000
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**			
2	07				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**			
2	07	03			**Progam Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	**Prosentase penerapan program pelatihan berbasis kompetensi dengan kualifikasi klaster**	**100%**	**752.172.950**

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
2	07	03	2.01		**Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi**	**Persentase peserta pelatihan yang telah mandiri secara ekonomi**	**72%**	**642.375.950**
2	07	03	2.01	0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat Pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	220 orang	642.375.950
2	07	03	2.02		**Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta**	**Persentase LPK swasta yang dibina**	**82%**	**79.850.000**
2	07	03	2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah lembaga pelatihan kerja swasta yang dibina	45 lembaga	79.850.000
2	07	03	2.04		**Konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil**	**Persentase perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktifitas**	**11%**	**29.947.000**
2	07	03	2.04	0001	Pelaksanaan konsultasi produktifitas pada perusahaan kecil	Jumlah perusahaan kecil yang mendapat konsultasi peningkatan produktifitas	15 perusahaan	29.947.000
2	07	04			**Program Penempatan Tenaga Kerja**	**Persentase pencari kerja yang ditempatkan**	**84%**	**1.450.684.800**
2	07	04	2.01		**Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase pencari kerja terdaftar yang mendapatkan fasilitasi pelayanan antar kerja**	**87%**	**1.117.691.800**

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
2	07	04	2.01	0001	Penyediaan sumberdaya pelayanan antar kerja	Jumlah SDM pelayanan antar kerja yang mendapatkan pelatihan melalui bimtek dll untuk meningkatkan kompetensi	50 orang	99.975.000
2	07	04	2.01	0002	Pelayanan Antar Kerja	Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan melalui layanan AKAD dan AKL	120 orang	884.248.000
2	07	04	2.01	0004	Pelayanan unit layanan disabilitas ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	40 orang	133.468.800
2	07	04	2.03		**Pengelolaan informasi pasar kerja**	**Persentase penempatan tenaga kerja melalui sistem informasi pasar kerja (IPK online)**	**85%**	**181.125.000**
2	07	04	2.03	0003	Jobfair/bursa kerja	Jumlah pencari kerja yang mendapatkan pekerjaan melalui jobfair/bursa kerja	250 orang	181.125.000
2	07	04	2.04		**Perlindungan PMI (pra dan purna penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase PMI (pra dan purna penempatan) yang terfasilitasi**	**85%**	**151.868.000**
2	07	04	2.03	0003	Pemberdayaan Pekerja migran indonesia purna penempatan	Jumlah PMI purna yang diberdayakan	40 orang	151.868.000

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
2	07	05			**Program Hubungan Industrial**	**Persentase Perselisihan Hubungan Industrial yang diselesaikan diluar Pengadilan**	**90%**	**520.456.250**
2	07	05	2.01		**Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanajian Kerja Bersama untu yang Mempunyai Wilayah Kerja Lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota**	**Jumlah perusahaan yang telah menyelenggarakan jaminan sosial tenaga kerja diatas 50%**	**80 perusahaan**	**20.666.200**
2	07	05	2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial teaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah data dan informasi sarana HI (PP/PKB struktur skala upah dan LKS Bipartit) dan pekerja yang terdaftar sebagai peserta jamsostek serta pengupahan	1 laporan	20.666.200
2	07	05	2.02		**Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Presentase Angka Sengketa per Tahun**	**2,3%**	**499.790.050**
2	07	05	2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perselisihan yang dicegah	5 perkara	314.083.900
2	07	05	2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, MogokKerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak	Jumlah Perkara perselisihan yang terselesaikan (Penyelesaian Perselisihan HI)	4 perkara	73.626.500

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
					pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			
2	07	05	2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang dibina	1 lembaga	55.766.050
2	07	05	2.02	0005	Pengembangan pelaksanaan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	Terlaksananya program jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas kesejahteraan pekerja	14.500 orang	56.313.600
					Urusan Pemerintahan Pilihan			
3	32				**Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi**			
3	32	03			**Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi**	**Persentase tingkat keberhasilan transmigran yang diberangkatkan**	**50%**	**31.500.000**
3	32	03	2.01		**Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**	**Persentase calon transmigran yang diberangkatkan**	**50%**	**31.500.000**
3	32	03	2.01	0004	Pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah transmigran yang dipindahkan dan ditempatkan	2 KK	8.000.000
3	32	03	2.01	0009	Penjajagan ke calon lokasi penempatan calon transmigran	Jumlah calon lokasi penempatan transmigran yang dilaksanakan penjajagan	1 lokasi	2.000.000

Kode Rekening					Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif (Rp)
						Uraian (Output)	Target	
3	32	03	2.01	0019	Bantuan permodalan (dalam bentuk uang saku)	Jumlah bantuan permodalan yang diberikan kepada transmigran	2 paket	20.000.000
3	32	03	2.01	0020	Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigrasi	Jumlah lokasi transmigrasi yang dilaksanakan monitoring dan evaluasi	1 lokasi	1.500.000

Tabel 4.4

Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan Khusus

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Jenis Belanja	Sasaran Penerima Manfaat			Sumber Pendanaan
			Nama Objek	Jumlah	Rincian	
		NIHIL				

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja, serta pagu indikatif Dinas Tenaga Kerja sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025.

Dalam pelaksanaan tahun berjalan, apabila terdapat ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Perubahan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dimaksud dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk Tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Dinas Tenaga Kerja dengan rencana pembangunan tahunan daerah (RKPD), sebagai implementasi sasaran strategis rencana pembangunan daerah (RPD) dan Renstra Dinas Tenaga Kerja yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka panjang Daerah Kabupaten Nganjuk.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Seluruh unit kerja pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Nganjuk secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   a. Melaksanakan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya.
   b. Melakukan pemantauan dan supervisi terhadap penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Dinas Tenaga Kerja untuk memastikan bahwa program dan kegiatan, lokasi, pagu indikatif dan indikator kinerja, serta kelompok sasaran sesuai dengan Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja ; dan
   c. menjaga konsistensi antara RKPD, Rencana Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.